

# Dana Penanggulangan Bencana Rawan Disalahgunakan

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 32 kasus ketidakefektifan penggunaan dana penanggulangan bencana alam senilai Rp152,51 miliar.

Untuk mengeliminasi penyalahgunaan dana tersebut di kemudian hari, pemerintah didesak segera menetapkan mekanisme pencairannya agar lebih tertata dan bisa dipertanggungjawabkan.

Demikian dikatakan pengamat ekonomi Indef Ahmad Erani Yustika, menanggapi alokasi dana penanggulangan bencana alam 2011 sebesar Rp4 triliun yang dianggarkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2011.

Ia mengatakan hingga saat ini dana penanggulangan bencana termasuk salah satu pos alokasi anggaran yang rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan penyalurannya.

Seperti termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, pada semester II 2009, lembaga auditor itu menemukan 32 kasus ketidakefek-



Mekanisme pengadaan di level kementerian dan kabupaten/kota harus ada bukti tertulis.”

## Ahmad Erani Yustika

Pengamat ekonomi

tifan penggunaan dana bencana pada tujuh entitas.

Adapun contoh kasus yang disebutkan dalam laporan itu antara lain penggunaan dana bantuan bencana di Kota Padang dan Bantul.

Disebutkan, dana bantuan langsung senilai Rp9,36 miliar untuk penggantian kerusakan rumah masyarakat akibat gempa pada September 2007, belum disalurkan.

Selain itu, penyaluran uang lauk pauk (ULP) tidak tertib

dan kurang dibayarkan minimal senilai Rp12,76 miliar.

Untuk dugaan ketidakefektifan penggunaan dana bantuan bencana di Bantul, antara lain bantuan langsung masyarakat senilai Rp117 juta tidak seluruhnya digunakan untuk membangun rumah masyarakat. Akibatnya, masih ada rumah warga belum selesai dibangun.

Menurut Erani, meskipun bencana tidak dapat diprediksi, setidaknya tanda terima maupun tanda pengeluaran untuk penanggulangan bencana bisa dicatat pada level kepanitiaan kabupaten/kota.

“Biasanya beralih sedang dalam kondisi darurat dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan adalah, meski dalam situasi darurat, mekanisme pengadaan di level kementerian dan kabupaten/kota harus ada bukti tertulis,” kata Erani, kemarin.

Sementara itu, untuk 2011, pemerintah menaikkan alokasi anggaran bencana menjadi Rp4 triliun dari Rp3,7 triliun di 2010. (Rm/E-5)